



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Gubernur H.A. Bastari Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring
Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan - Kode Pos. 30267
email : info@dpmptsp.palembang.go.id website : www.dpmptsp.palembang.go.id

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NOMOR 440/IOPNF/0189/DPMTSP-PPK/2022



TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL (IOPNF)

- DASAR :**
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 1821);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Memperhatikan :
 - Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Non Formal Saudara/i **RAHMAD DANI** Nomor Pendaftaran **9001.188.10.2022** tanggal **11 Oktober 2022**
 - Hasil penelitian lapangan dan rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Palembang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor **0189/RKM-IOPNF/DPM-PTSP/2022** tanggal **16 November 2022** ;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Operasional Pendidikan Non Formal yang ditetapkan dengan Surat Izin Walikota Palembang.

MENGIZINKAN :

KEPADA : Nama Penanggung Jawab : **RAHMAD DANI**
Alamat Penanggung Jawab : **JL. SEMATANG BORANG NO. 1199 RT. 024 RW. 010 KELURAHAN SAKO
KECAMATAN SAKO PALEMBANG**
Jabatan : **PENGELOLA/PENANGGUNG JAWAB TEKNIS EDUKATIF**

UNTUK : Untuk Melaksanakan Operasional Pendidikan Non Formal, dengan data sebagai berikut:

- Nama Lembaga : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DWI RAMA AL-IKHLAS**
- Alamat Lembaga : **JL. SEMATANG BORANG NO. 1199 RT. 024 RW. 010 KELURAHAN SAKO
KECAMATAN SAKO PALEMBANG**
- Jenis Satuan : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
- Program : **KELOMPOK BERMAIN (KB)**

Surat Izin Operasional Pendidikan Non Formal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sbb:

- Pemegang Izin wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Jika terjadi perubahan susunan organisasi kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk mengurus Izin operasional satuan pendidikan Non Formal yang baru;
- Surat izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal tidak dikenakan biaya retribusi (Rp. 0,-) berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Surat Izin Operasional Pendidikan Non Formal akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.



Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 November 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

Ir. GUNAWAN, M.T.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 196512181993031002



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002010.AH.01.04.Tahun 2023
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN DWI RAMA SRIWIJAYA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ZULKIFLI RUSDI, S.H., sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 01 Februari 2023 yang dibuat oleh Notaris ZULKIFLI RUSDI, S.H. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DWI RAMA SRIWIJAYA tanggal 05 Februari 2023 dengan Nomor Pendaftaran 5023020516100576 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DWI RAMA SRIWIJAYA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN DWI RAMA SRIWIJAYA
berkedudukan di KOTA PALEMBANG sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 01 Februari 2023 yang dibuat oleh Notaris ZULKIFLI RUSDI, S.H. berkedudukan di KOTA PALEMBANG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Februari 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 06 Februari 2023

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0003096.AH.01.12.Tahun 2023 TANGGAL 06 Februari 2023

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH

ZULKIFLI RUSDI, SH



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002010.AH.01.04.Tahun 2023
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN DWI RAMA SRIWIJAYA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
RAHMAD DANI	1671081610700009

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
RAHMAD DANI	1671081610700009	PEMBINA	KETUA
RAHMA SARI	1671084106010001	PENGURUS	KETUA
EFRIANA	1671085804840012	PENGURUS	SEKRETARIS
SUHARTINI	1671084101700016	PENGURUS	BENDAHARA
ROHMAN	1607101708780003	PENGAWAS	KETUA



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Februari 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 Februari 2023

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0003096.AH.01.12.Tahun 2023 TANGGAL 06 Februari 2023



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002010.AH.01.04.Tahun 2023
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN DWI RAMA SRIWIJAYA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
RAHMAD DANI	1671081610700009

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
RAHMAD DANI	1671081610700009	PEMBINA	KETUA
RAHMA SARI	1671084106010001	PENGURUS	KETUA
EFRIANA	1671085804840012	PENGURUS	SEKRETARIS
SUHARTINI	1671084101700016	PENGURUS	BENDAHARA
ROHMAN	1607101708780003	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Februari 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 Februari 2023

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0003096.AH.01.12.Tahun 2023 TANGGAL 06 Februari 2023



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002010.AH.01.04.Tahun 2023
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN DWI RAMA SRIWIJAYA**

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ZULKIFLI RUSDI, S.H., sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 01 Februari 2023 yang dibuat oleh Notaris ZULKIFLI RUSDI, S.H. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan Dwi Rama Sriwijaya tanggal 05 Februari 2023 dengan Nomor Pendaftaran 5023020516100576 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan Dwi Rama Sriwijaya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN DWI RAMA SRIWIJAYA
berkedudukan di KOTA PALEMBANG sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 01 Februari 2023 yang dibuat oleh Notaris ZULKIFLI RUSDI, S.H. berkedudukan di KOTA PALEMBANG.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Februari 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 06 Februari 2023

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0003096.AH.01.12.Tahun 2023 TANGGAL 06 Februari 2023

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH

ZULKIFLI RUSDI, SH